

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Fajar Rakasiwi

Universitas Terbuka Sulawesi Barat; rakasiwifajar@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Februari 2024

Revised Februari 2024

Accepted Februari 2024

Kata Kunci:

Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efisiensi, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keywords:

Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Growth Ratio, Efficiency Ratio, Local Original Income (PAD)

ABSTRAK

Otonomi daerah (otoda) memiliki kewenangan di tingkat daerah untuk mengawasi dan mengendalikan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prakarsa masyarakat. Administrasi fiskal daerah merupakan elemen pemerintahan daerah yang memerlukan pengawasan yang ketat. Dengan menganalisis rasio keuangan, efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dapat dievaluasi. Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio efektivitas, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, dan rasio efisiensi PAD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan PAD. Populasi dalam penelitian ini, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemkab. Sidenreng Rappang di mana sampel yang diambil adalah delapan tahun terakhir (2015-2022). Variabel independen yang diteliti adalah rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian, sedangkan variabel dependennya adalah efisiensi PAD. Nilai probabilitas sebesar 0,009 yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi PAD dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, sebagaimana hasil analisis regresi. Rasio kemandirian secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efektivitas PAD. Namun demikian, dampak dari rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan terhadap efisiensi PAD dapat diabaikan.

ABSTRACT

Regional autonomy (otoda) is the regional authority to regulate and manage the interests of local communities according to their own initiatives based on community aspirations and in accordance with applicable laws and regulations. One aspect of local government that must be carefully regulated is regional financial management. Dengan melihat kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, analisis rasio keuangan menjadi sangat penting. Rasio keuangan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio efisiensi PAD, merupakan empat rasio keuangan yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kinerja tim kepemimpinan di Kab. Sidenreng Rappang berpengaruh signifikan terhadap efektivitas proses pelaksanaan PAD. Pokok bahasan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang, dimana sampel yang disediakan adalah untuk tahun kedua belas (2015). Sebagai variabel independen adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan dan rasio efisiensi PAD. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa sumbu kemandirian, efektivitas, dan pertumbuhan mengalami pertumbuhan

yang signifikan akibat pengaruh PAD dari tahun 2015 hingga 2022, dengan interval kepercayaan 0,009 hingga 0,05. Secara parsimoni, rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap efektivitas PAD. Sebaliknya, baik rasio efisiensi maupun rasio pertumbuhan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap efektivitas PAD.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Fajar Rakasiwi
Institution: Universitas Terbuka Sulawesi Barat
Email: rakasiwifajar@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah (otoda) memungkinkan daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menurut prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah diawali dengan diberlakukannya UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mengandung makna pembagian sumber daya yang proporsional, transparan, demokratis, dan berkeadilan di antara daerah-daerah dengan mempertimbangkan kemampuan, keadaan, dan kebutuhan masing-masing daerah. Perimbangan ini diselenggarakan sesuai dengan kewajiban dan struktur kewenangan yang meliputi pengawasan dan pengelolaan keuangan.

Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten untuk mengawasi semua urusan pemerintahan, termasuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi; hal ini mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan kemampuan mereka dalam membangun dan mengembangkan daerahnya. Perkembangan bangsa, yang menandakan keinginan masyarakat akan desentralisasi dan transparansi, pada kenyataannya, merupakan faktor terpenting dalam menentukan apakah otonomi harus dilaksanakan. Selain itu, berbagai situasi internasional menjadi bukti bahwa globalisasi progresif yang semakin cepat menuntut setiap negara, termasuk pemerintah daerah, untuk memiliki daya saing. Tujuan ini akan dicapai melalui inisiatif otonomi yang bertujuan untuk meningkatkan otonomi pemerintah daerah. Tujuan utama dari program otonomi adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan atribut masing-masing daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang sangat penting bagi Pemda. Posisi penting dalam upaya meningkatkan kemampuan dan efektivitas Pemda didukung oleh APBD. Alat ini memiliki banyak tujuan, termasuk memfasilitasi penentuan pendapatan dan pengeluaran, mendukung proses pembangunan dan pengambilan keputusan, menetapkan tolok ukur untuk pengeluaran di masa depan, menyediakan sumber ukuran evaluasi kinerja yang terstandarisasi, memotivasi pegawai, dan mengkoordinasikan kegiatan berbagai unit kerja.

Tujuan utama pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan dan untuk menunjukkan pertanggungjawaban mereka dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan. Pemerintah

daerah, yang ditugaskan untuk melaksanakan pelayanan publik, pembangunan, dan kemasyarakatan, berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Laporan-laporan ini menilai sejauh mana pemerintah daerah telah secara efektif memenuhi kewajibannya. Pendekatan yang digunakan untuk menilai kemahiran pemerintah daerah dalam mengawasi keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah diimplementasikan. Analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap APBD dan realisasinya belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah peraturannya. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio realisasi APBD tetap diperlukan. Analisis rasio realisasi APBD dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi efektivitas AUTODA yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengawasi keuangan daerah. Kebijakan ini, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan kontrol yang lebih besar terhadap keuangan daerah, seharusnya dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rasio Kemandirian

Halim, as cited in Mauludin and Dewi (2020), defines the Regional Financial Independence Ratio (RKKD) as the capacity of local governments to fund services, economy, and development initiatives in accordance with the interests of the people who are willing to pay local taxes and levies, which are utilized to augment PAD sources. The indicator utilized in this research is identical to the RKKD variable, which is derived from the product of the PAD and Balance Fund calculations.

Nugraha and Amelia (2017) postulate that there exists a positive correlation between the ratio of regional financial independence and community welfare (as measured by HDI). This implies that as regional financial independence increases, the balance fund transitions from requiring principal and interest to acquiring it, thereby bolstering HDI.

With long-term benefits, an increase in PAD can augment the regional expenditure budget for financing profitable sectors. The allocation of funds for human development is one such item. One of these allocations is designated for educational purposes, including the provision of scholarships for disadvantaged students, enhancements to educational support facilities, and other funds intended to assist with education. Menurut Kusumawati & Wiksuana (2018), semua aktivitas produksi barang serta jasa yang dapat meningkatkan perekonomian negara pada periode tertentu disebut sebagai pertumbuhan ekonomi.

2.2 Rasio Efektivitas

Faud (2016:140), Rasio efektivitas, sebagaimana dinyatakan, berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah yang diantisipasi sehubungan dengan tujuan yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan potensi aktual daerah tersebut. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian antara hasil program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu hasil dianggap efektif jika sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan, yang mencakup semua peraturan yang relevan.

Menurut Adisasmita (2011:170), efektivitas berkaitan dengan tingkat kesesuaian antara hasil program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas suatu hasil dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan strategi yang telah ditetapkan, yang mungkin mencakup kepatuhan terhadap peraturan. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana operasi sektor publik mencapai tujuan yang telah ditetapkan; oleh karena itu, kegiatan dianggap efektif jika secara signifikan berdampak pada kapasitas untuk memberikan layanan masyarakat yang telah ditetapkan.

2.3 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan keberhasilan yang telah dicapai pada pemerintah daerah dari satu periode ke periode berikutnya. Penting untuk menilai kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan keuangan daerah, rasio ini juga digunakan untuk menentukan peluang

keuangan daerah yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Rasio pertumbuhan yang positif menandakan bahwa pemerintah daerah mampu mengalokasikan belanja modalnya secara efektif dan melampaui tolok ukur yang telah ditetapkan. Selain itu, rasio ini juga mengindikasikan kinerja investasi yang baik, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak menghadapi kesulitan keuangan (Wulandari & Arza, 2020). Rasio pertumbuhan penting untuk menentukan apakah kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat atau menurun sepanjang tahun anggaran atau periode anggaran. Apabila pertumbuhan pendapatan ke arah positif maka kinerja keuangan daerah cenderung sehat dan meningkat. Sebaliknya, pertumbuhan ke-arah negatif mengakibatkan penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah (Arumdari, 2019).

Rasio pertumbuhan adalah metrik yang berharga untuk menilai apakah kinerja anggaran pemerintah daerah telah menunjukkan pertumbuhan positif atau negatif dalam hal pendapatan atau pengeluaran selama tahun fiskal yang bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran (Mahmudi, 2010). Rasio ini menilai sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil mempertahankan dan memperluas pencapaiannya dari waktu ke waktu. Tujuan menghitung Rasio Pertumbuhan adalah untuk mengidentifikasi daerah dengan potensi yang belum dimanfaatkan. Pertumbuhan positif dihasilkan ketika biaya operasional berkurang dan total pendapatan daerah (TPD), belanja modal, dan PAD, yang semuanya diikuti oleh pemerintah, lebih besar satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perkembangan wilayah tersebut telah secara konsisten dipertahankan dan meningkat selama periode waktu yang berurutan. Pertumbuhan negatif terjadi ketika belanja operasi, penyisihan utang, dan TPD meningkat, sementara belanja modal menurun. Akibatnya, wilayah ini menghadapi tantangan dalam meningkatkan ekspansi wilayahnya. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan maka semakin dapat memenuhi kebutuhan belanja pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Sularno dan Restianto, 2018).

2.4 Rasio Efisiensi

Menurut (Mahmud, 2019), Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar - besarnya (*spending well*). Rasio efisiensi dapat mencerminkan antara anggaran belanja dengan terwujudnya yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan (Karina & Wibowo, 2022).

2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pungutan yang dikumpulkan oleh daerah sesuai dengan peraturan dan kebijakan daerah. Pemerintah daerah menghasilkan pendapatan dari sumber internal untuk membiayai operasi pemerintah, membangun fasilitas layanan publik, dan membangun infrastruktur (Saleh, 2020). Pendapatan asli daerah terdiri dari dana yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam wilayah daerah tersebut (Budiarso et al., 2015). Semakin banyak pendapatan yang didapatkan, akan sangat memungkinkan daerah tersebut memenuhi kebutuhan belanja daerahnya sendiri tanpa tergantung dari dana transfer pemerintah pusat (Ramadhan, 2019). Suryani & Pariani (2018), berpendapat bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah yang substansial setiap tahunnya menunjukkan sumber daya keuangan daerah yang substansial. Efektivitas pemerintah daerah dapat dinilai secara akurat dengan memeriksa sejauh mana sumber daya keuangannya digunakan dan dikelola secara efisien.

3. METODE PENELITIAN

Investigasi dilakukan di Kompleks Perkantoran Jalan Salotungo yang terletak di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Kabupaten Sidenreng Rappang

merupakan salah satu daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Letak geografis yang sangat strategis dan kondisi alam yang mendukung, terutama untuk lahan pertanian, menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi.

3.1 Data Collection

Pada penelitian ini bermetode penelitian kuantitatif dengan variabel dalam penelitian terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1), Rasio efektifitas (X2). Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah rasio efisiensi PAD (Y). Dalam penelitian ini, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi populasi sekaligus sampel. Kriteria pengambilan sampel untuk penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mencakup periode delapan tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.

3.2 Data Analysis

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan rasio keuangan untuk menilai indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk mencapai hal tersebut, maka akan dilakukan uji analisis regresi berganda yang meliputi Uji Parsial (Uji T) dan Uji Simultan (Uji F).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah berfungsi sebagai indikator kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai operasi, inisiatif pembangunan, dan layanan masyarakatnya sendiri. Selain itu, rasio kemandirian menunjukkan ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan eksternal, terutama pemerintah federal dan provinsi. Sebaliknya, tingkat otonomi daerah yang lebih besar berkorelasi dengan berkurangnya ketergantungan pada bantuan eksternal (terutama dari pemerintah pusat dan provinsi). Tabel di bawah ini menyajikan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah.

Tabel 1. Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Sidenreng Rappang

Keterangan Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rasio Kemandirian
2015	8.914.222.635,39	169.168.080.079,14	12.188.130.364,00	4,92%
2016	6.084.124.834,80	179.180.422.067,79	10.164.422.657,00	3,21%
2017	6.876.125.679,32	201.193.276.220,00	10.146.928.131,00	3,25%
2018	11.266.106.312,36	325.463.397.877,00	5.389.408.621,00	3,41%
2019	16.280.918.440,79	364.303.221.066,00	8.358.266.957,00	4,37%
2020	17.460.780.983,52	392.132.343.171,00	38.657.223.368,00	4,05%
2021	15.879.402.285,47	414.327.271.541,00	30.961.364.434,00	3,57%
2022	16.531.437.645,61	397.522.593.650,00	90.618.295.232,14	3,39%

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2024)

Tabel 1, Diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemkab. Sidenreng Rappang dalam delapan tahun terakhir (2015-2022) hanya mengalami tiga kali kenaikan, yaitu pada tahun 2016-2017 sebesar 0,04% (3,25%-3,21%), 2017-2018 sebesar 0,16% (3,41%-3,25%), dan 2018-2019 sebesar 0,83% (4,24%-3,41%). Selebihnya mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu 2015-2016 sebesar 1,71% (4,92%-3,21%), 2019-2020 sebesar 0,19% (4,24%-4,05%), tahun 2020-2021 sebesar 0,48% (4,05%-3,57%) hingga tahun 2021-2022 sebesar 0,18% (3,57%-3,39%)

4.2 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan PAD yang telah ditetapkan sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan potensi aktual daerah. Efektivitas didefinisikan sebagai kemampuan daerah untuk memenuhi tanggung jawabnya ketika rasio yang dicapai sama dengan atau lebih besar dari seratus persen. Semakin tinggi kemampuan daerah, semakin besar rasio efektivitasnya. Hasil perhitungan rasio efektivitas PAD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keterangan (Tahun)	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efektifitas
2015	10.565.242.572,00	8.914.222.635,39	84,37%
2016	8.146.203.368,00	6.084.124.834,80	74,69%
2017	6.709.499.464,00	6.876.125.679,32	102,48%
2018	7.764.902.747,00	11.266.106.312,36	145,10%
2019	14.810.965.660,00	16.280.918.440,79	109,92%
2020	13.419.093.406,00	17.460.780.983,52	130,12%
2021	18.083.539.916,00	15.879.402.285,47	87,81%
2022	20.423.100.023,06	16.531.437.645,61	80,94%

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2024)

Tabel 2, Dapat dilihat bahwa rasio efektifitas Pemkab. Sidenreng Rappang di delapan tahun terakhir (2015-2022) mengalami kenaikan sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2016-2017 sebesar 27,79% (102,48%-74,69%), 2017-2018 sebesar 42,62% (145,10%-102,48%), dan 2019-2020 sebesar 23,3% (130,12%-106,82%). Selebihnya mengalami penurunan pada tahun 2015-2016 sebesar 9,68% (84,37%-74,69%), 2018-2019 sebesar 38,28% (145,10%-109,92%), tahun 2020-2021 sebesar 42,31% (130,12%-87,81%), dan tahun 2021-2022 sebesar 6,87% (87,81%-80,94%).

4.3 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mempertahankan dan meningkatkan kemajuan yang telah dicapai pada setiap periode berikutnya. Dengan memahami perkembangan PAD, maka dapat dinilai peluang daerah mana yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Seiring dengan meningkatnya persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi pula kapasitas pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian setiap periode. Hasil perhitungan rasio pertumbuhan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang

Keterangan (Tahun)	PADt0	PAD1	Rasio Pertumbuhan
2015-2016	8.914.222.635,39	6.084.124.834,80	-31,75%
2016-2017	6.084.124.834,80	6.876.125.679,32	13,02%
2017-2018	6.876.125.679,32	11.266.106.312,36	63,84%
2018-2019	11.266.106.312,3	16.280.918.440,79	44,51%
2019-2020	16.280.918.440,79	17.460.780.983,52	7,25%
2020-2021	17.460.780.983,52	15.879.402.285,47	-9,06%
2021-2022	15.879.402.285,47	16.531.437.645,61	4,11%

Tabel 3, ada dua periode dalam delapan tahun terakhir (2015-2022) di mana rasio pertumbuhan Pemkab. Sidenreng Rappang negatif, yaitu pada tahun 2015-2016 sebesar -31,75%, dan 2020-2021 sebesar -9,06%. Adapun rasio pertumbuhan yang mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2015-2016 sebesar -31,75% naik menjadi 13,02% tahun 2016-2017, kemudian naik menjadi 63,84% pada tahun 2017-2018. Begitupula pada tahun 2020-2021 sebesar -9,06% naik menjadi 4,11% tahun 2021-2022. Selebihnya mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2017-2018 turun dari 63,84%

menjadi 44,51% pada tahun 2018-2019, kemudian turun menjadi 7,25% tahun 2019-2020, dan turun menjadi -9,06% tahun 2020-2021.

4.4 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mendapatkan pengukuran yang lebih akurat, rasio efektivitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang telah dicapai pemerintah. Rasio efisiensi mengukur hubungan antara biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dan jumlah pendapatan yang benar-benar direalisasikan. Efisiensi kinerja pemerintah daerah ditentukan oleh apakah rasio yang dicapai di bawah seratus persen atau setengahnya. Rasio efisiensi yang lebih rendah menandakan kapasitas daerah yang lebih baik.

Hasil perhitungan rasio efisiensi PAD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2015-2022

Tahun	Keterangan	Realisasi Penerimaan (PAD)	Biaya Pemungutan PAD	Rasio Efisiensi
2015		8.914.222.635,39	6.341.105.060,00	71,13%
2016		6.084.124.834,80	72.943.008,00	1,20%
2017		6.876.125.679,32	89.812.848,00	1,31%
2018		11.266.106.312,36	1.335.081.366,00	11,85%
2019		16.280.918.440,79	10.723.999.999,00	65,87%
2020		17.460.780.983,52	11.490.926.673,00	65,81%
2021		15.879.402.285,47	241.776.290,00	1,52%
2022		16.531.437.645,61	247.021.054,00	1,49%

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2024)

Tabel 4, dapat dilihat bahwa rasio efisiensi PAD Pemkab. Sidenreng Rappang dalam delapan tahun terakhir (2015-2022) mengalami kenaikan sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2016-2017 sebesar 0,11% (1,31%-1,20%), 2017-2018 sebesar 10,54% (11,85%-1,31%), 2018-2019 sebesar 54,02% (65,87%-11,85%). Sebaliknya mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2015-2016 sebesar 69,93% (71,13%-1,20%), 2019-2020 sebesar 0,06% (65,87%-65,81%), 2020-2021 sebesar 64,29% (65,81% - 1,52%), 2021-2022 sebesar 0,03% (1,52%-1,49%).

4.5 Uji Hipotesis

Analisis kinerja keuangan daerah Pemkab. Sidenreng Rappang terhadap efisiensi PAD atau pengaruh rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan terhadap efisiensi PAD dapat dilihat dari analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS (Statistical Product Service Solution) seperti pada lampiran berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi

Coefficients ^a						
Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients			
Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	
1	(Constant)	-221.627	41.699		-5.315	.006
	Rasio Kemandirian	51.147	7.279	.943	7.026	.002
	Rasio Efektivitas	.583	.295	.438	1.972	.120
	pertumbuhan	-.272	.249	-.245	-1.093	.336

a. Dependent Variable: Rasio Efisiensi

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2024)

Berdasarkan hasil analisis regresi yang tertera pada tabel 5, diperoleh persamaan regresi yang distandarkan, yaitu:

$$\text{Efisiensi} = 0,943\text{RK} + 0,438\text{RE} - 0,245\text{RP}$$

Di mana:

RK = Rasio Kemandirian

RE = Rasio Efektifitas

RP = Rasio Pertumbuhan

Model regresi tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan rasio kemandirian satu satuan akan diikuti kenaikan rasio efisiensi sebesar 0,943.

4.6 Uji T atau Uji Parsial

4.6.1 Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Efisiensi PAD

Program SPSS menghitung nilai thitung dan ttabel masing-masing sebesar 2,78 dan 0,002 untuk pengaruh rasio kemandirian terhadap efisiensi PAD, berdasarkan hasil uji parsial. Karena nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-kritis dari t-tabel dan nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka hipotesis dapat diterima. Hal ini menandakan bahwa rasio kemandirian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi PAD.

4.6.2 Pengaruh Rasio Efektifitas terhadap Efisiensi PAD

Berdasarkan hasil uji parsial, program SPSS menghitung thitung sebesar 1,972 dan ttabel sebesar 2,78 untuk pengaruh rasio efektivitas terhadap efisiensi PAD, dengan nilai signifikansi sebesar 0,120. Hipotesis ditolak karena nilai thitung lebih besar dari ttabel dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas PAD tidak dipengaruhi secara signifikan oleh rasio efektivitas.

4.6.3 Pengaruh Rasio Pertumbuhan terhadap Efisiensi PAD

Berdasarkan hasil uji parsial, program SPSS menghitung pengaruh rasio pertumbuhan terhadap efisiensi PAD sebagai berikut: thitung = -1,093; ttabel = 2,78; nilai signifikansi = 0,336. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 dan thitung lebih kecil dari ttabel, maka hipotesis ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas PAD tidak dipengaruhi secara signifikan oleh rasio pertumbuhan.

Tabel 6 Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA ^b						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7273.299	3	2424.433	17.820	.009a
	Residual	544.196	4	136.049		
	Total	7817.495	7			

a . Predictors: (Constant), pertumbuhan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas
 b . Dependent Variable: Rasio Efisiensi

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2024)

Uji F (Uji Simultan) memberikan hasil sebagai berikut: Fhitung sebesar 17,820 dan Ftabel sebesar 6,59, yang keduanya memiliki nilai signifikansi sebesar 0,09. Hipotesis diterima dengan dua syarat yaitu Fhitung lebih besar dari Ftabel dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap efisiensi PAD secara simultan melalui rasio efektivitas, rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan.

PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Nilai probabilitas sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa rasio kemandirian berpengaruh secara parsial namun signifikan terhadap efisiensi PAD, seperti yang ditunjukkan oleh hasil analisis data yang telah dipaparkan di atas. Berdasarkan hasil analisis regresi, model regresi menunjukkan bahwa peningkatan satu unit pada rasio kemandirian akan meningkatkan efisiensi PAD sebesar 0,943 unit. Sebaliknya, selama delapan tahun terakhir, rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berfluktuasi secara signifikan (2015-2022). Meskipun demikian, Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terus meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan 9 (sembilan) sektor usaha yang

dimilikinya, yaitu: pertanian, pertambangan dan penggalian; industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih; konstruksi; perdagangan; hotel dan restoran; angkutan dan komunikasi; keuangan; persewaan dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa.

Rasio Efektivitas Terhadap Pendapat Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan hasil analisis regresi secara parsial, rasio efektifitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD terbukti dari nilai probabilitas sebesar $0,120 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa apa yang ditargetkan belum tentu sama dengan realisasi yang ada. Target bisa lebih besar dari realisasi, dan sebaliknya target bisa lebih kecil dari realisasi. Nilai probabilitas sebesar $0,336$ lebih besar dari $0,05$ yang menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap efikasi PAD yang ditentukan melalui analisis regresi parsial. Hal ini menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan tidak mempunyai pengaruh menguntungkan terhadap kemandirian PAD.

Rasio Efektifitas, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Efisiensi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara simultan, dapat diketahui bahwa variabel independen yang digunakan, yaitu rasio kemandirian (X_1), rasio efektifitas (X_2), dan rasio pertumbuhan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu efisiensi PAD (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai Fhitung sebesar $17,820$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,009$ yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu $0,05$. Nilai R Square sebesar $0,930$ menunjukkan bahwa efisiensi PAD pada Pemkab. Sidenreng Rappang dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan sebesar 93% . Sedangkan sisanya, 7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Selama tahun berjalan, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kinerja keuangan daerah yang baik. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, hal ini dipengaruhi oleh rasio kemandirian, efektifitas, dan pertumbuhan.
2. Selama satu tahun terakhir, PAD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang secara konsisten menerapkan kinerja yang efektif. Informasi tersebut di atas diperoleh dari proyeksi rasio efisiensi PAD dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.
3. Selama tahun intervening (2015) sampai dengan tahun 2022, Efisiensi PAD sedikit dipengaruhi oleh sikap Komite Presiden tentang Administrasi di Rappang.
4. Selama tahun intervening (2015) sampai dengan 2022, rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang didistribusikan secara tidak signifikan dengan pengaruh efisiensi PAD.
5. Selama periode sepuluh tahun dari tahun 2015 hingga 2022, rasio pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan dampak yang dapat diabaikan terkait dengan efektivitas PAD.
6. Duranto satu setengah dekade (2015-2022), rasio pertumbuhan, rasio efisiensi, dan konsolidasi rasio efektivitas memiliki pengaruh yang besar terhadap efisiensi PAD.

Saran yang perlu di pertimbangkan Pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun

dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan seperti akuntan profesional. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD).

DAFTAR PUSTAKA

- Rahardjo, Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bastian, Indra. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Halim, Abdul. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Darsono dan Ashari. (2018). *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta: ANDI.
- Faud, M Ramli. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ghozali, Imam. (2019). *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kieso, Donal E., dkk. (2017). *Intermediate Accounting*. (Diterjemahkan Oleh: Gina Gania dan Ichsan Setiyo Budi). Jakarta: Erlangga.
- Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. (2018). *Akuntabilitas dan Good Governance: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*. Jakarta: LAN dan BPKP.
- Wulandari, Y., & Indra Arza, F. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2 (3), 3160–3178. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.276>.
- Arumdari, R. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan*. [Skripsi/Thesis Universitas Muhammadiyah Sumatera]. <https://core.ac.uk/download/pdf/225828012.pdf>
- Nuurannisa, Pratiwi, & Arifin, Atwal (2018) *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Studi pada Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Periode 2014-2016*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://eprints.ums.ac.id/69228/>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Luthfi, M., & Mahmudi, M. A. (2019). Pemanfaatan script imacross untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemasaran digital pada media sosial face book. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2019*.
- Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 15(2), 111. DOI: <https://doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226>
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. DOI: <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Budiarso, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, R. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 23–32.
- Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(1), 12–22
- Karina, N.N., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Ekspansi : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, 14 (2), 146–166. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.451>